

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999)

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia)

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 RI Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Buku

Abdullah, I. (2013). *Bentuk-bentuk Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (ALternative Dispute Resolution)*. Jakarta: Yamba.

Ahmadi Miru, S. Y. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Rajawali Pers.

Andi Sri R.W, N. T. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Barkatulah, A. H. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: Nusa Media.

Dean G. Pruitt, J. Z. (2004). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jaya, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Quadrant.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Muthiah, A. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Salim HS, E. S. (2020). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sembiring, J. J. (2011). *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.
- Umam, K. (2010). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Ygyakarta: Pustaka Yustitia.

Jurnal

- Atuti, H. D. (2015). Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Mimbar Justitia*, 574.
- Deviana Yuanitasari, H. K. (2019). Eksistensi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Dalam Pengawasan Pencantuman Klausula Baku Dalam Sistem Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. *Jurnal Ius*, 429.
- Diah Wahyulina, F. C. (2018). Penegakan Hukum Sengketa Konsumen Oleh BPSK Untuk Pencegahan Pelanggaran Hak Konsumen. *Jurnal Et-Tijarie*, 99.
- Hidayati, M. N. (2008). Analisis Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen (Studi Tentang Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). *Jurnal Lex Jurnalica*, 171.
- Kurniawan. (2012). Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 161.
- Purwadi, A. (2004). Penyelesaian Sengketa Alternatif Pada Sengketa Konsumen. *Jurnal Perspektif*, 273.
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 23.
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 18.
- Rusli, T. (2012). Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-undangan . *Jurnal Keadilan Progresif*, 88.
- Taufikkurahman. (2015). Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Jurnal Iqtishadia*, 30.

Lainnya

Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “*Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia*” diakses di <https://kbbi.web.id/>. Pada 16 September 2021.